

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu imigran sudah menjadi bagian penting dari sejarah perpolitikan Amerika Serikat (AS) yang dibuktikan dengan adanya gagasan bahwa AS merupakan bangsa imigran klasik. Gagasan ini tertulis dalam buku "*A Nations of Immigrants*" yang ditulis oleh Presiden AS, John F. Kennedy pada tahun 1958.¹ Nilai bangsa Amerika yang merupakan tanah kebebasan terkandung dalam puisi yang ditulis oleh Emma Lazarus pada plakat Patung Liberty, di mana hal ini menggambarkan bahwa AS merupakan tanah harapan bagi orang miskin, tertindas, dan orang-orang yang haknya dirampas di negara asalnya, lalu kemudian mencari kehidupan yang lebih baik di AS. Sejatinya, AS dianggap sebagai surga kebebasan yang terbuka untuk para imigran dari seluruh dunia.²

Pada tahun 2017, AS menjadi negara dengan jumlah imigran terbanyak di dunia³. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah imigran yang ada di AS pada tahun 2017 mencapai angka 44,4 juta, angka ini menyumbang 13,6% dari semua penduduk di AS. Sejalan dengan itu, 77% dari jumlah imigran di AS masuk secara legal (sah menurut hukum), sedangkan 23% sisanya masuk secara ilegal (tidak sah menurut hukum).⁴ Kebijakan *War on Terror* sebagai respon dari tragedi 9/11 membuat isu imigran semakin hangat diperbincangkan. Kebijakan ini tak hanya membawa dampak buruk terhadap

¹ Leti Volpp, "*The Indigenous As Alien*," *5 U.C. Irvine L.Rev*, Vol. 5, Issue 2, (2015): 289-290

² Akhil Amar, *America' Constitution: A Biography; The Records of the Federal Convention of 1787* (Max Farrand ed., 1911), (2006): 70

³ Gustavo López., et al., "*Key Finding about US Immigrants*", *Pew Research Center*, 2017

⁴ Jynnah Radford, "*Key finding about US Immigrants*," *Factank: News in the Numbers*, 2019

imigran Muslim, namun juga terhadap semua imigran tanpa memandang etnis dan status hukum (legal dan ilegal).⁵

Pandangan dan stereotip negatif terhadap imigran semakin mencuat ke permukaan pada masa kampanye calon presiden AS tahun 2016. Donald Trump sebagai kandidat dari Partai Republik secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai isu imigran melalui serangkaian retorika anti-imigran, dan ujaran kebencian kepada semua kelompok imigran yang bersifat *xenophobic*.⁶ Di antara kelompok imigran yang paling dikecam Trump dalam pidato kampanye pemilihannya adalah imigran Meksiko dan imigran Muslim.⁷ Salah satu pernyataan kontroversialnya mengenai imigran dapat dilihat dari sambutan yang disampaikan di Phoenix, Arizona, pada 31 Agustus 2016, Trump menyampaikan pidato mengenai imigran dan menyatakan:

"When Mexico sends it people, they're not sending the best. They're not sending you, they're sending people that have lots of problems and they're bringing those problems. They're bringing drugs, they're bringing crime. They're rapists and some, I assume, are good people, but I speak to border guards and they're telling sus what we're getting"

"I love the Mexican people, but Mexico is not our friend. They're killing us at the border and they're killing us on jobs and trade, FIGHT!"

Pernyataan Trump mengenai "Meksiko" mengarah pada imigran, terutama imigran ilegal. Trump memandang bahwa imigran Meksiko merupakan penjahat, pengedar narkoba, serta pemerkosa yang berpotensi membahayakan keamanan AS. Selain itu, Trump juga menganggap Meksiko sebagai lawan karena "membunuh" AS dari aspek ekonomi. Ia juga menyudutkan imigran ilegal

⁵ Walter A. Ewing, Daniel E. Martinez, and Ruben G. Rumbaut, "The Criminalization of Immigration in the United States", *Special Report of American Immigrations Council* (2015): 15

⁶ Monica Vereas, "Anti-Immigrant and Anti-Mexican Attitudes And Policies during the First 18 Months of the Trump Administration", *North-America*, Año 13, número 2, julio-diciembre de 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2018.2.335>, (Juli 2018): 198

⁷ Elizabeth Chacko, "Immigration and Populist Policies in The United States of America," 3

Meksiko sebagai mesin pembunuh di wilayah perbatasan AS-Meksiko dengan menyatakan, *"We must stop the crime and killing machine that is illegal immigration. Rampant problems will only get worse"*.⁸ Meskipun demikian, jumlah imigran ilegal Meksiko hanya separuh dari semua jumlah imigran ilegal di AS, dan jumlah imigran ilegal Meksiko juga mengalami penurunan dari 6,4 juta pada tahun 2009 menjadi 4.9 juta pada tahun 2017.⁹

Di samping itu, Trump juga mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyudutkan imigran muslim di AS. Islam dianggap sebagai agama yang suka berperang dan bertentangan dengan nilai-nilai Kristen yang dianut oleh mayoritas orang kulit putih di AS. Gagasan populis bahwa imigran muslim adalah orang yang kejam digarisbawahi dalam Pidato Trump, *"Our country cannot be the victim of horrendous attacks by people that believe only in jihad and have no sense of reason or respect for human life"*.¹⁰ Pernyataan Trump tersebut menggambarkan jika imigran muslim juga dianggap menjadi ancaman bagi keamanan nasional dengan melakukan aksi terorisme.¹¹

Kemudian, retorika anti-imigran semakin gencar dilayangkan oleh pemerintahan Trump guna menggambarkan kelompok imigran sebagai ancaman eksistensial, khususnya imigran ilegal. Mereka dianggap merugikan ekonomi AS karena membebani negara, menjadi penjahat yang merebut pekerjaan penduduk Amerika, serta menurunkan standar upah minimum mengingat jumlah pencari kerja dari kelas imigran lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan pekerjaan

⁸ Yohannes William Santoso, "Kecenderungan Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump," *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, (2018): 11

⁹ Mary Romero, "Trump's Immigration Attacks, in Brief", *American Sociological Association, Contexts, Vol. 17, Issue 1, ISSN 1536-5042, Electronic ISSN 1537-6052*, (2018): 35

¹⁰ Elizabeth Chacko, 4

¹¹ Mary Romero, 39

yang tersedia.¹² Mereka juga dianggap mengancam kesejahteraan masyarakat AS dengan menggambarkan mereka sebagai bagian dari "krisis kemanusiaan dan keamanan".¹³ Perbatasan selatan dan barat daya merupakan pintu gerbang masuknya gerombolan orang yang membawa "kematian dan kehancuran". Trump menuduh jika imigran yang melintasi perbatasan tak hanya penjahat, namun juga calon teroris asal Timur Tengah yang menyusup dan mengancam keamanan AS.

Ancaman eksistensial juga berasal dari penyeludupan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya melalui wilayah perbatasan yang dilakukan oleh kartel Narkoba yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Latin, Laut Karibia, dan Samudera Pasifik.¹⁴ Di samping itu, ancaman eksistensial juga berasal dari imigran ilegal yang diseludupkan oleh Transnational Criminal Organizations (TCOs) yang umumnya berasal dari negara Meksiko, Amerika Latin dan Amerika Tengah. TCOs yang bergerak di bisnis *human trafficking*, pengedaran narkoba, pencurian, penipuan, dan prostitusi.¹⁵

Di sisi lain, bukti empiris membantah pernyataan Trump yang menuduh semua imigran sebagai penjahat dan mengancam keamanan nasional AS. Di mana umumnya imigran yang datang ke AS ialah pencari suaka dan pengungsi yang mencari perlindungan dari kejahatan dan kondisi buruk di negara asalnya, seperti kejahatan *gangsters* dan kartel narkoba, ketidakstabilan kondisi ekonomi-politik, serta masalah keamanan lainnya yang mengharuskan mereka melewati perbatasan

¹² Nils Lange, "Speaking and Perceiving Security: A Case Study of the Trump Administration's Securitization of Illegal Immigration Fueling Populism in US," *Bachelor Thesis of International Relations, Malmo University (2019)*: 25

¹³ Shelton, Joel T, "Diagnosing Europe: Greece, Macedonia, and the Meaning of Crisis," *New Perspectives: Interdisciplinary Journal of Central and East European Politics (2017)*. 19

¹⁴ Kristin Finklea, "Illicit Drug Flows and Seizures in the United States: What Do We [Not] Know?", *Congressional Research Service, R45812, (Juli 2018)*: 5

¹⁵ U.S. Department of Justice Drug Enforcement Administration, "2018 National Drug Threat Assessment", *Report (2018), DEA-DCT-DIR-032-18, 96-100*

secara ilegal karena mengingat sistem keimigrasian AS yang ketat.¹⁶ Kemudian, meskipun jumlah imigran mengalami kenaikan dari tahun 1990 (19,8 juta) ke tahun 2017 (41,3 juta), namun tingkat kejahatan menurun 48%, termasuk dalam kasus penyerangan, pemerkosaan dan pembunuhan.¹⁷

Sayangnya, Trump tetap mengambil tindakan darurat sebagai upaya sekuritisasi dengan memperluas tembok perbatasan AS-Meksiko, menjaga wilayah perbatasan dengan kekuatan militer, hingga mengeluarkan kebijakan *Travel Ban* di awal pemerintahannya.¹⁸ Dr. Ryan Burke dan Jahara Matissek menilai jika Presiden Trump menggunakan otoritas eksekutifnya untuk "mendeklarasikan keadaan darurat nasional" terhadap isu imigran meski melanggar politik normal.¹⁹ Hal ini sejalan dengan Proffesor Flona de Londras yang menyatakan bahwa perintah eksekutif merupakan bentuk dari upaya sekuritisasi, karena perintah eksekutif tersebut memberlakukan pengecualian menyeluruh, daripada melakukan analisis keamanan individu terhadap para imigran yang memasuki AS, dan di situlah letak klaim diskriminasi daripada kontrol perbatasan yang sah.²⁰ Apalagi upaya sekuritisasi ini juga didukung oleh sederet pejabat AS, dan partai Republik. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana sekelompok orang dalam pemerintahan memengaruhi publik dengan melakukan upaya sekuritisasi terhadap isu imigran di AS.

¹⁶ Silva Mathema, "They Are (Still) Refugees: People Continue to Flee Violence in Latin American Countries," *Center of American Progress* (2018): 1

¹⁷ Walter A. Ewing, Daniel E. Martinez, and Ruben G. Rumbaut, 5

¹⁸ International Crisis Group, "Mexico's Southern Border: Security, Violence and Migration in the Trump Era," *Latin America Report N°66*, (2018): 11

¹⁹ Ryan Burke dan Jahara Matissek, "Executive Orders and Troops on the Border: Political Norms and The Securitization of American Problems," Modern War Institute, diakses melalui <https://mwi.usma.edu/executive-orders-troops-border-political-norms-securitization-american-problems/>, pada 7 Juni 2021

²⁰ University of Birmingham, "Trump's Immigration Ban: A Legacy of Securitized Immigration Rhetoric?" diakses melalui <https://www.birmingham.ac.uk/research/perspective/trump-immigration-ban.aspx>, pada 7 Juni 2021

1.2 Rumusan Masalah

Isu imigran menjadi bagian penting dari sejarah perpolitikan AS dan memunculkan gagasan jika AS adalah tanah harapan dan kebebasan bagi para imigran dari seluruh dunia. Namun, nilai-nilai tersebut mulai hilang ketika Donald Trump menyebarkan retorika anti-imigran di masa kampanye hingga setelah ia menjabat sebagai presiden AS. Pemerintahan Trump menggiring opini publik dengan menggambarkan imigran sebagai ancaman yang dapat membahayakan keamanan nasional AS. Meskipun penelitian empiris menunjukkan tidak semua imigran mengancam keamanan AS, namun tetap saja pemerintahan Trump melakukan sekuritisasi, apalagi tindakan tersebut juga didorong sederet pejabat AS dan partai Republik. Untuk itu penting bagi penulis untuk meneliti bagaimana isu imigran di AS disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana isu imigran disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses sekuritisasi isu imigran di AS pada masa Pemerintahan Donald Trump.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai sekuritisasi isu imigran di AS pada masa pemerintahan Donald Trump

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terkait proses dan pelaksanaan sekuritisasi isu imigran di suatu negara yang kemudian memengaruhi pemikiran masyarakat

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi utama yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Mega Nisfa Makhroja dengan judul "Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa".²¹ Tulisan ini menjelaskan mengenai sekuritisasi isu imigran di Polandia sebagai respon dari krisis pengungsi di Eropa setelah *Arab Spring*. Teori Sekuritisasi yang digagas oleh Buzan dkk menjadi pisau analisis dalam melihat bagaimana isu imigran di sekuritisasi oleh pemerintah Polandia. Pemerintah Polandia memutuskan untuk membatasi jumlah migran dari Afrika dan Timur Tengah dengan alasan menjaga keamanan nasional dari kelompok terorisme dan radikalisme, meskipun Uni Eropa telah membagi kuota migran di tiap negara anggota sesuai artikel no. 78 dalam Traktat Lisbon.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian penulis adalah memberikan informasi mengenai indikator yang terdapat dalam proses sekuritisasi terhadap masalah migran, seperti adanya kedaulatan dan masyarakat Polandia sebagai *referent objects* yang keamanannya terancam oleh ancaman eksistensial dari imigran Afrika dan Timur Tengah, adanya pemerintah Polandia sebagai aktor sekuritisasi melalui serangkaian *speech-act*, media dan organisasi masyarakat sebagai aktor fungsional, serta Uni Eropa dan masyarakat global sebagai *audience*

²¹ Mega Nisfa Makhroja, "Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa", *IJPSS: Jurnal Studi Perdamaian dan Keamanan Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2020): 1-15

dalam rangka melegitimasi upaya sekuritisasi dari pemerintah terhadap masalah imigran di Polandia. Selain itu, juga terdapat dua tahapan dalam proses sekuritisasi, yakni tahap pemunculan isu bahwa imigran adalah ancaman bagi keamanan Polandia, serta tahap meyakinkan *audience* melalui serangkaian *speech-act* dari Perdana Menteri Polandia serta anggota parlemen Polandia untuk Uni Eropa, yang menyatakan bahwa multikulturalisme bukanlah nilai bangsa Polandia.²² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah negara yang dianalisis, yakni Amerika Serikat.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Yohannes William Santoso dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga dalam tulisannya yang berjudul "*Kecenderungan Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump*".²³ Jurnal ini mencoba menjelaskan mengenai relasi antara kemunculan ideologi nativisme sebagai bentuk dari proses konstruksi identitas bangsa nativis (penduduk asli) yang menggeser kecenderungan identitas nasional AS sebagai bangsa imigran. Penelitian ini berakar dari kebijakan pemerintahan Trump yang lebih bersifat restriktif dengan cenderung mengkriminalisasi imigran ilegal dari Meksiko. Kebijakan tersebut menggambarkan jika AS merupakan bangsa nativis yang eksklusif dibandingkan bangsa imigran yang inklusif.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian penulis adalah memberikan informasi mengenai pengaruh ideologi nativisme dalam sikap Donald Trump terhadap masalah imigran yang ditandai dengan adanya slogan "*Make America*

²² Mega Nisfa Makhroja, "Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa", 10

²³ Yohannes William Santoso, "Kecenderungan Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump", *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Vol. 1, No. 2, (2018): 1-24

Great Again". Slogan ini mengisyaratkan keinginan Trump untuk membuat AS mencapai masa kejayaannya kembali melalui kebijakan yang berbasis *America First*. Ideologi nativisme ini erat kaitannya dengan pendukung aliran populisme yang dekat dengan partai sayap kanan yang memang anti terhadap imigran. Kita dapat melihatnya dari pernyataan Trump yang mengatakan "*I love the Mexican People, but Mexico is not our friend*".²⁴ Trump berusaha mengonstruksi identitas masyarakat AS melalui narasi-narasinya di media. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat jika penelitian ini berfokus pada kecenderungan kebijakan di masa Donald Trump yang didukung oleh ideologi nativisme yang sudah mulai berkembang di masyarakat kontemporer. Ini akan membantu penulis dalam menganalisis bagaimana isu imigran disekuritisasi di AS pada masa pemerintahan Trump.

Di samping memahami kecenderungan kepemimpinan di masa pemerintahan Trump, maka juga diperlukan tulisan yang membahas mengenai perbedaan sikap presiden AS mengenai masalah imigran melalui tulisan yang berjudul "*Attitudes of the United States' Presidents Towards Immigration: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump*"²⁵. Ayman Al Sharafat menganalisis mengenai sikap Presiden AS terhadap imigrasi pada periode 2001-2009 yang dimulai dari masa George W. Bush hingga pada masa Donald Trump. Analisis sikap presiden diambil dari dokumen resmi masing-masing presiden mengenai upaya mereka dalam menyelesaikan masalah imigran. Pertama, Bush memiliki perhatian yang cukup besar terhadap masalah imigran dan berupaya melakukan reformasi komprehensif terhadap kebijakan imigrasi. Ia juga membentuk Bilateral

²⁴ Yohannes William Santoso, 11

²⁵ Ayman Al Sharafat, "Attitudes of the United States' Presidents Towards Immigration: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump," *RSA Journal*, Issue 30 (2019): 53-67

Cooperation Group on immigration pada tahun 2001 dengan pemerintah Meksiko. Bush percaya bahwa imigran merupakan sumber daya penting bagi ekonomi AS. Namun, akibat peristiwa 9/11, Bush prihatin dengan keamanan negara, dan mengeluarkan serangkaian kebijakan yang tegas terhadap imigran.

Kedua, sikap Obama lebih terbuka dan ramah terhadap imigran karena ia berasal dari keturunan imigran, di mana ayah kandungnya berkebangsaan Kenya dan ayah tirinya dari Indonesia. Obama menilai jika imigran memberikan kontribusi kepada negara, tak hanya dalam sektor ekonomi, namun juga pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan ia sering memberikan beasiswa kepada pelajar asing untuk menimba ilmu di AS. Meskipun ia tidak bisa meloloskan RUU DREAM Act untuk memudahkan imigran ilegal mendapatkan kewarganegaraan AS, namun ia sudah memberikan kesempatan kepada imigran ilegal yang memenuhi syarat untuk tinggal sementara di AS sampai masa tiga tahun sebelum dideportasi melalui program DACA dan DAPA.²⁶

Ketiga, Donald Trump yang menjadi satu-satunya Presiden dalam sejarah AS yang secara terbuka mengambil sikap garis keras tentang imigrasi. Ia juga gencar menyebarkan retorika anti-imigrannya untuk membentuk opini publik bahwa imigran merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS. Sikap Trump terlihat sangat berbeda jauh dengan presiden pendahulunya, ia sangat agresif untuk membentuk kebijakan keras terhadap imigran. Penelitian ini berkontribusi kepada penelitian penulis dalam menganalisis perbedaan sikap Trump dan presiden-presiden sebelumnya dalam menyikapi masalah imigran. Namun,

²⁶ Ayman Al Sharafat, 61

perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian, yakni sekuritisasi isu imigran di AS pada masa pemerintahan Donald Trump.

Tinjauan selanjutnya ialah jurnal yang ditulis oleh Victoriana Melati dengan judul "*The Impact of Migration Securitization on The Increase of Islamophobia-Based Attacks in The United States in 2015-2019.*"²⁷ Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana AS di bawah pemerintahan Trump menjadikan isu migrasi sebagai agenda sekuritisasi dengan membatasi jumlah imigran yang masuk ke AS, khususnya imigran muslim dengan kebijakan *Travel Ban*. Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Trump dilakukan dengan membingkai isu imigran muslim sebagai ancaman eksistensial yang membahayakan keamanan AS karena melakukan aksi terorisme. Trump menyampaikan sejumlah *speech-act* yang menyudutkan imigran muslim guna politisasi ketakutan warga AS terhadap terorisme agar memilihnya di pemilu 2016 untuk menjadi Presiden ke-45 AS. Kemenangan Trump membuka langkahnya untuk melakukan sekuritisasi terhadap imigran muslim melalui kebijakan *Travel Ban* dengan melarang masuknya orang-orang dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian penulis adalah memberikan informasi bahwa upaya sekuritisasi isu imigran muslim memberikan dampak buruk terhadap peningkatan serangan berbasis islamphobia terhadap muslim di AS. Sentimen anti-muslim tersebut berupa vandalisme, ekspresi kebencian, serangan, dan tembakan terhadap kelompok muslim Amerika. Pembungkahan Trump terhadap muslim sebagai ancaman berhasil membuat publik AS membenci

²⁷ Victoriana Melati, "The Impact of Migration Securitization on The Increase of Islamophobia-Based Attacks in The United States in 2015-2019," *Indonesian Journal of International Relations*, ISSN 2548-4109, Vol. 4, No. 1 (2020): 69-91.

dan mengutuk imigran Muslim. Namun, perbedaannya, penelitian penulis lebih difokuskan pada upaya sekuritisasi isu imigran di masa Donald Trump.

Terakhir, tulisan yang ditulis oleh Ben Fermor dan Jack Holland dalam judul "*Security and polarization in Trump's America: securitization and the domestic politics of threatening others.*"²⁸ Tulisan ini membahas mengenai adanya perang posisi dan perubahan kebijakan luar negeri dalam perpolitikan AS di masa pemerintahan Donald Trump, khususnya mengenai sekuritisasi isu imigran. Pemerintahan Trump kembali mengungkit luka lama publik AS dalam kenangan buruk tragedi 9/11 dalam membingkai bahwa imigran merupakan ancaman yang nyata bagi keamanan AS, khususnya terkait ancaman terorisme. Upaya sekuritisasi isu imigran ditata rapi dalam kebijakan *Travel Ban*, meskipun Ben dan Jack menyatakan ancaman yang digaungkan Trump kurang eksistensial dan kurang mendesak untuk kemudian dibungkus dengan kebijakan luar biasa.

Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan informasi bahwa terjadi perang posisi antara pandangan Partai Demokrat yang cenderung ramah terhadap imigran dengan Partai Republik yang cenderung anti terhadap imigran. Meskipun Kongres didominasi oleh Demokrat, namun kebijakan Trump untuk melakukan sekuritisasi terkait isu imigran mendapat dukungan dari kelompok minoritas kecil yang sangat vokal dalam Kongres, seperti Joe Wilson dan Louie Gohmert. Selain itu, pemerintahan Trump menuduh jika Demokrat dan kelompok sayap kiri yang mendukung nilai-nilai liberal merupakan ancaman tersendiri dari sisi internal AS. Demokrat dinilai lunak terhadap kejahatan, imigrasi dan terorisme dan

²⁸ Ben Fermor dan Jack Holland. "Security and polarization in Trump's America: securitization and the domestic politics of threatening others," *Global Affairs*, DOI: 10.1080/23340460.2020.1734958, (2020): 1-17

menempatkan orang Amerika di posisi yang berbahaya karena kebijakan politik normal yang dinilai tidak mampu melindungi keamanan AS.

Sejalan dengan itu, kritikus dari Demokrat serta media menilai bahwa kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Trump merupakan ancaman eksistensial bagi AS. Hal ini merujuk pada akibat dari kebijakan luar negeri AS terkait isu imigran, seperti kebijakan *Travel Ban* dan membangun tembok di wilayah perbatasan AS-Meksiko yang menjadi sorotan dan menerima sejumlah kritikan dari dunia internasional. Upaya sekuritisasi isu imigran di masa pemerintahan Trump juga dianggap mencoreng nilai-nilai liberal Amerika yang cenderung mengutamakan kebebasan individu, serta menjadi tanah harapan bagi imigran di seluruh dunia. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini lebih menitikberatkan pada proses sekuritisasi isu imigran di masa pemerintahan Donald Trump daripada bagaimana perang posisi dan perubahan kebijakan luar negeri pada pemerintah AS terkait isu imigran.

Lebih jauh lagi, dalam beberapa tulisan di atas, peneliti masih belum menemukan penelitian terdahulu yang membahas mengenai sekuritisasi isu imigran pada masa Donald Trump. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha meneliti lebih dalam mengenai bagaimana isu imigran di AS disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Sekuritisasi

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan kerangka konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan,

Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Konsep sekuritisasi ini dituangkan dalam buku yang berjudul *Security: A New Framework of Analysis*, dalam buku tersebut mereka menjelaskan bahwa sekuritisasi merupakan langkah yang diambil dengan melampaui aturan main secara umum dalam membingkai suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya. Secara sederhana, keamanan diartikan sebagai upaya untuk bertahan, sedangkan sekuritisasi merupakan bentuk ekstrim dari upaya politik.²⁹

Sekuritisasi juga diartikan sebagai proses mengonstruksi sebuah isu agar memiliki nilai keamanan dan patut untuk diperhatikan.³⁰ Sekuritisasi terjadi ketika aktor menggunakan narasi ancaman untuk menggambarkan sebuah isu diluar kondisi “politik normal”, sehingga sekuritisasi juga disebut sebagai proses intersubjektivitas yang terbentuk karena adanya *existential threat* serta memiliki efek politik.³¹ Umumnya, setiap isu publik dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori antara lain:³²

1. *Nonpoliticized* yang berarti bahwa isu publik tersebut tidak menjadi bahan perdebatan publik serta tidak menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menangani permasalahan tersebut.

²⁹ Barry Buzan, Ole Wæver, & Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder Colo: Lynne Rienner (1998): 23

³⁰ Peter Hough, et al., *International Security Studies: Theory and Practice*, (New York:Routledge, 2015): 81

³¹ Mega Nisfa Makhroja, "Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa", *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, Vol. 2 No. 1 (January - June 2020), 7

³² Barry Buzan, et al., 22-23

2. *Politicized*, yang berarti bahwa suatu isu menyangkut kepentingan publik dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikannya melalui serangkaian kebijakan ataupun dalam hal alokasi sumber daya yang dibutuhkan.

3. *To securitized*, yang berarti bahwa suatu isu telah dianggap sebagai sebuah ancaman keamanan yang nyata, membahayakan hajat orang banyak, serta membutuhkan tindakan darurat untuk mengatasinya melalui suatu prosedur di atas prosedur politik biasa serta dianggap sah untuk dilakukan.

Buzan melihat bahwa sekuritisasi dilakukan ketika suatu isu dinilai sebagai permasalahan yang mendesak dan diperlukan upaya penanganan yang komprehensif. Isu sekuritisasi terjadi ketika suatu negara menghadapi sebuah isu yang dianggap membahayakan serta mengancam keamanan nasional, dan membutuhkan langkah-langkah darurat dengan mengabaikan batas norma dalam prosedur politik normal. Hal ini menggambarkan adanya pergeseran suatu isu keamanan dari ranah politik normal ke ranah politik darurat.

Akan tetapi, sebuah isu yang berubah ke isu keamanan tidak hanya disebabkan karena isu itu dinilai benar-benar mengancam (*existential threat*), namun lebih disebabkan karena isu tersebut dimunculkan sebagai isu yang mengancam.³³ Hal itu mengacu pada praktik *Self-Referential* dalam sekuritisasi. Praktik inilah yang bisa mengubah sifat suatu isu menjadi isu keamanan, yang mana proses perubahan ini bukan hanya karena disebabkan oleh adanya

³³ Barry Buzan, et al., 24-25

ancaman nyata dari isu tersebut, akan tetapi lebih disebabkan oleh dampak dari adanya penekanan masalah yang kemudian dijadikan sebagai suatu ancaman.³⁴

Selanjutnya Buzan, Waever, Jaap de Wilde menjelaskan jika dalam melakukan analisa terhadap keamanan dan pengartikulasian keamanan melalui pendekatan *speech-act*, diperlukan lima unit yang berhubungan dengan upaya analisa proses sekuritisasi, antara lain terdiri dari:

1. *Referent objects*, merupakan sesuatu yang dilihat secara nyata terancam serta memiliki tuntutan resmi untuk bertahan atau mempertahankan diri. Dalam pandangan tradisional, biasanya yang menjadi *referent object* ialah negara ataupun bangsa. Adapun *referent object* bagi negara adalah kedaulatan, sedangkan bagi bangsa adalah identitas.³⁵ Namun *referent object* ternyata tidak hanya sebatas pada negara dan bangsa, tetapi juga berbagai spektrum yang berpotensi untuk menjadi *referent object*.³⁶ Sejatinya, aktor akan melakukan segala cara untuk meyakinkan publik terhadap sebuah *referent object*. Keberhasilan atau kegagalan aktor dalam meyakinkan publik terhadap perubahan suatu isu ke isu keamanan, tergantung kepada kemampuan setiap aktor dalam membingkai serta mengagendakan isu bersangkutan.
2. *Securitizing actors*, merupakan seseorang ataupun kelompok individu yang melakukan aksi *speech-act* serta berusaha menjadikan sebuah isu

³⁴ Barry Buzan, et al., 23-24

³⁵ Waever 1988 dan 1995, dikutip dalam Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap De Wilde, *Security a New Framework for Analysis*. (Colorado, USA: Lynne Rienner Publisher, Inc, 1998), 36

³⁶ Waever 1988 dan 1995, 36

biasa menjadi isu keamanan.³⁷ *Securitizing actors* akan menyampaikan berbagai bentuk ancaman ekstensial apabila isu keamanan tersebut tidak ditangani dengan cepat serta harus ditangani dengan metode di luar politik normal. Umumnya, aktor sekuritisasi bisa berasal dari golongan pemerintah, birokrat, pimpinan politik, pelobi, kelompok kepentingan serta kelompok penekan pada sebuah pemerintahan di suatu negara.

3. *Existential Threat*, yang merupakan bentuk-bentuk ancaman yang muncul dari isu yang dianggap mengancam keamanan nasional suatu negara, di mana hal inilah yang menjadi dasar *securitizing actors* untuk melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu yang dianggap membahayakan kelangsungan *referent object*. Dalam hal ini, yang menjadi *Existential Threat* nya adalah isu imigran yang ada di AS, di mana imigran yang memasuki wilayah AS, khususnya secara ilegal melalui perbatasan AS-Meksiko dianggap sebagai gerombolan penjahat dan calon terorisme asal Timur Tengah yang juga ikut menyeludup.

4. *Functional actors*, merupakan aktor yang memberikan efek terhadap dinamika pembuatan kebijakan keamanan, menentukan perkembangan dari proses sekuritisasi di suatu sektor tertentu tanpa harus menjadi *securitizing actor* maupun *referent objects*, memainkan peran penting namun tidak berupaya mengubah sebuah isu menjadi isu keamanan.³⁸

Dalam hal ini, yang menjadi *functional actors* nya adalah media yang berpengaruh pada dinamika imigran di AS.

³⁷ Waever 1988 dan 1995, 36

³⁸ Buzan et al., 36

5. *Audience*, merupakan pihak atau target yang akan dipersuasi oleh aktor sekuritisasi dalam rangka mendapatkan persetujuan untuk melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu. Di mana nantinya *audience* diharapkan melegitimasi isu yang disekuritisasi oleh aktor sekuritisasi, yang dalam hal ini diwakili oleh penduduk AS.

Sekuritisasi juga dapat dilakukan melalui retorika bahasa atau *Speech act*, yang berarti adanya tindakan dari aktor untuk melabeli sebuah isu publik menjadi isu keamanan. Nantinya, aktor tersebutlah yang akan menjelaskan bahwasanya terdapat sebuah *referent object* yang terancam keamanannya karena adanya ancaman eksistensial. Aktor juga menetapkan standar darurat untuk keberlangsungan *referent object* tersebut. Pengkondisian keadaan darurat inilah yang mendorong aktor untuk melangkahi atau melanggar aturan yang semestinya. Barulah nantinya sebuah isu yang sebenarnya bisa ditangani dengan prosedur politik normal saja harus berubah untuk ditangani dengan prosedur politik darurat yang memungkinkan aksi secara cepat dan tanpa aturan politik resmi.³⁹

Di samping itu, Copenhagen School menjelaskan ada dua tahap dalam proses sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi terhadap suatu isu :

1. Tahap Pemunculan Isu

Proses ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aktor sekuritisasi dalam menggambarkan munculnya suatu isu-isu tertentu yang akan disekuritisasi. Aktor sekuritisasi akan berusaha memunculkan suatu isu ke permukaan agar menarik perhatian *audience*. Pada langkah pertama sekuritisasi, aktor sekuritisasi

³⁹ Ryta Floyd, *Security And The Environment: Securitisation Theory and the U.S Environment Security Policy*, (London: Cambridge University Press, 2010), 13

yang bisa terdiri atas aktor negara dan non-negara akan menggambarkan isu-isu, orang, kelompok atau entitas tertentu yang dianggap sebagai ancaman eksistensial dan akan membahayakan *referent object*.⁴⁰ Kemudian, isu-isu tersebut akan ditetapkan sebagai masalah yang dapat mengancam keamanan nasional ataupun internasional karena dianggap lebih penting dan darurat dari pada isu-isu lainnya. Bahkan, isu tersebut juga dapat didramatisasi dan dipresentasikan agar menjadi prioritas utama dari pemerintahan suatu negara dalam upaya sekuritisasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat jika proses sekuritisasi dibentuk secara sosial, karena sebuah isu diubah menjadi agenda keamanan dengan hanya melakukan upaya pembingkaiannya menjadi ancaman, bukan hanya karena adanya ancaman eksistensial nyata. Sejalan dengan itu, Copenhagen School juga melihat bahwa sekuritisasi merupakan bagian dari "intersubjective practice" yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi yang bertindak untuk meyakinkan audience secara signifikan.⁴¹

2. Tahap Meyakinkan Audience

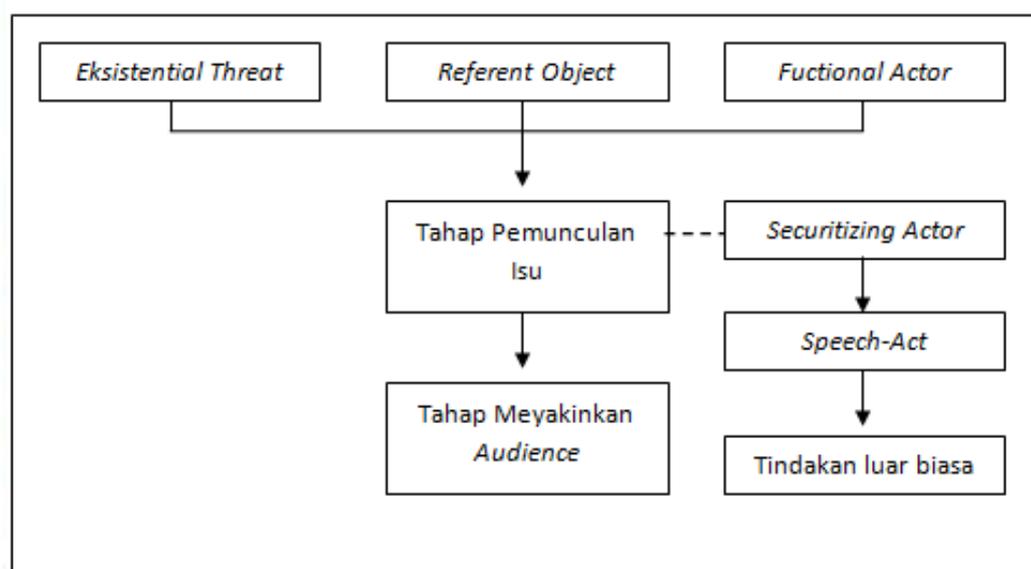
Tahap ini akan menunjukkan keberhasilan sekuritisasi tergantung pada berhasil atau tidaknya audience (opini publik, politisi, aparat militer, atau elit lainnya) dipersuasi atau diyakinkan oleh aktor sekuritisasi dalam menerima atau melegitimasi suatu isu yang dianggap menjadi ancaman eksistensial dan membahayakan kelangsungan *referent object*. Setiap tindakan sekuritisasi merupakan hasil dari keputusan politik, kebijakan politik dan sosial. Tindakan

⁴⁰ Open Edition Books. *Securitization theory according to the Copenhagen School*. Diakses dari <http://books.openedition.org/iheid/719> (terakhir diakses 15 Oktober 2020)

⁴¹ Open Edition Books. *Securitization theory according to the Copenhagen School*

sekuritisasi dianggap sukses ketika munculnya anggapan dan pengakuan bahwa kebijakan politik normal yang selama ini diberlakukan tidak mampu mengatasi isu yang dianggap mengancam.⁴²

Tahap kedua ini juga merupakan respon dari audience mengenai pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh aktor sekuritisasi mengenai suatu isu. Kemudian aktor sekuritisasi akan mengambil aksi luar biasa yang melampaui politik normal dan belum pernah diambil sebelumnya. Copenhagen School lebih menitikberatkan pada peran audience dalam mengakui adanya ancaman dari sebuah isu yang pada akhirnya akan dianggap mendukung *speech act* dari aktor sekuritisasi. Berikut adalah skema dari proses sekuritisasi :



Gambar 1.1 Proses Sekuritisasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan penjabaran konsep sekuritisasi tersebut, penulis melihat jika teori ini cocok digunakan dalam menganalisis bagaimana isu imigrasi di AS

⁴² Emmers R. "Securitization". Dalam *Contemporary Security Studies*, ed. Allan Collins, Hal. 111-115. Oxford University Press. New York. (2007): 340

disekritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump. Hal ini sejalan dengan hasil analisis yang peneliti laksanakan yang menunjukkan bahwasanya memang terdapat upaya sekritisasi dalam isu imigran di AS, sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pemerintah AS di bawah pemerintahan Donald Trump melakukan upaya sekritisasi terhadap isu imigran, meskipun data di lapangan menunjukkan jika narasi pemerintah yang menganggap imigran ancaman tidak berbanding lurus dengan hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, teori sekritisasi yang dikemukakan oleh Buzan dkk juga mampu membantu peneliti dalam melihat apa saja indikator-indikator yang terkandung dalam proses sekritisasi dan untuk melihat apakah suatu isu layak dikatakan sebagai bentuk sekritisasi serta bagaimana aktor melakukan proses sekritisasi tersebut.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelajahi dan memahami anggapan dari individu atau kelompok masyarakat serta mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu sosial dan kemanusiaan.⁴³ Adapun tujuan penulis menggunakan pendekatan ini ialah karena peneliti ingin memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai bagaimana isu imigran AS diseekritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump. Penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk membantu penulis dalam menggambarkan suatu

⁴³ Bakry, Umar Suryadi, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar): 60-74

fenomena, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat ini berdasarkan fakta dan data di lapangan.⁴⁴ Dalam hal ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana isu imigran di AS disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian berdasarkan rentang waktu dan batas wilayah penelitian, untuk rentang waktu penulis membatasi dari masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Proses sekuritisasi isu imigran di AS ini mulai dilakukan sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS ke-45 pada 20 Januari 2017 hingga tahun 2020. Namun, tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan data di luar batasan penelitian untuk memperkuat argumentasi penelitian ini. Setelah melalui proses penelitian, peneliti kemudian mendapati bahwa penelitian ini dibatasi sebelum Donald Trump menjabat sebagai Presiden ke-45 AS, yakni sejak masa kampanyenya di pemilu 2016. Sedangkan untuk wilayah penelitian, peneliti membatasi sesuai dengan negara yang peneliti analisis kebijakan nasionalnya, yakni Amerika Serikat (AS).

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Level dan unit analisis merupakan hal penting dalam melihat fokus penelitian dalam studi hubungan internasional. Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis, sedangkan unit eksplanasi merupakan unit yang menjadi penjelas dari unit analisis.⁴⁵ Dalam penelitian ini berdasarkan dari penjelasan latar belakang, dapat ditarik unit analisisnya yaitu sekuritisasi isu

⁴⁴ Hadari Nawawi, H. Murni Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. 2, 1996): 73

⁴⁵ Joshua S.Golstein, John C. Pavehouse, *Level of Analysis* (London: Pearson International Edition, International Relations, Eighth Edition, 2007): 17

imigran di masa Donald Trump. Unit eksplanasinya adalah masalah imigran di AS dan level analisisnya yaitu negara, Amerika Serikat.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai suatu topik yang sedang diteliti dalam sebuah penelitian, maka diperlukan sebuah teknik untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ialah studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari data sekunder, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel dalam buku/surat kabar/media cetak dan digital, arsip, laporan, dan hasil survei yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku yang dikarang oleh Barry Buzan dkk yang berjudul "*A Framework for Analysis*", dan buku dari Ole Waever yang berjudul "*On Security*". Untuk mengakses informasi di internet penulis menggunakan kata kunci seperti *Securitization Immigrant in U.S - Trump's Immigration Policy*, *Illegal Immigrants problems in U.S* dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan laporan dari beberapa lembaga penelitian dan website pemerintah mengenai isu imigran, seperti, U.S Department of Homeland Security (DHS), U. S Department of Justice, Drug Enforcement Administration, U.S Coast Guard Report, Council on Foreign Relations Report, International Crisis Group Report, American Immigrations Council Report dll. Serta menggunakan data statistik dari imigran yang ada di AS melalui Pew Reseach Center.

1.8.5 Teknik Analisa data

Penelitian ini akan berfokus pada analisa bagaimana proses sekuritisasi isu imigran yang dilakukan pemerintah AS terhadap isu imigran di masa pemerintahan Donald Trump. Dari data-data yang didapatkan, peneliti melakukan

analisis melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti akan menganalisis lima indikator atau unit yang terdapat dalam proses sekuritisasi, seperti aktor sekuritisasi (*securitizing actor*), pernyataan/pidato (*speech act*), ancaman eksistensial (*existential threat*), obyek referensi (*referent object*), pendengar (*audience*), dan aktor fungsional (*functional actor*). Kedua, peneliti akan menganalisis tahapan sekuritisasi berdasarkan konsep Sekuritisasi (*securitization*) yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Di mana tahapan itu terdiri atas tahap pemunculan isu dan tahap meyakinkan audience. Tahapan-tahapan tersebut akan menunjukkan bagaimana isu imigran disekuritisasi di AS pada masa pemerintahan Trump yang membedakan kebijakan-kebijakan imigrasinya dengan kebijakan imigrasi di masa pemerintahan sebelumnya.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penyusunan penelitian dan dapat dijadikan referensi yang baik, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan berisi alasan peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap bagaimana isu imigran AS disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Masalah Imigran di Masa Pemerintahan Donald Trump

Bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana permasalahan imigran di AS yang terjadi pada masa pemerintahan Donald Trump.

BAB III Respon Pemerintah Amerika Serikat Terkait Isu Imigran di Masa Pemerintahan Donald Trump

Bab ini akan menjelaskan tentang respon yang diambil oleh pemerintah AS di masa pemerintahan Donald Trump dalam menanggapi permasalahan imigran.

BAB IV Analisis Sekuritisasi Isu Imigran di Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump

Pada bab ini peneliti menggunakan kerangka konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam menganalisa bagaimana isu imigran di AS disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump.

BAB V Penutup

Bab ini akan membahas ringkasan dari pembahasan serta kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini terhadap topik penelitian yang diteliti.

